

KPK Perpanjang Penahanan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Bakamla

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan dua tersangka kasus korupsi terkait pengadaan perangkat transportasi informasi terintegrasi Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Tahun Anggaran 2016

Keduanya yaitu Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI TA 2016 Leni Marlina (LM) dan Anggota atau Koordinator Unit Layanan Pengadaan Bakamla RI TA 2016 Juli Amar Ma'arif (JAM).

"Tim Penyidik KPK memperpanjang masa penahanan selama 40 hari ke depan dimulai 21 Desember 2020 sampai dengan 29 Januari 2021 untuk dua tersangka LM di di Rutan KPK Gedung Merah Putih dan tersangka JAM di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Minggu (20/12), seperti dilansir dari Antara.

Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik KPK masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara dua tersangka tersebut. "Saat ini, pemberkasan perkara akan terus dilakukan tim penyidik KPK," kata Ali.

Seperti diketahui, dua tersangka tersebut bersama Direktur Utama PT CMI Teknologi

(CMIT) Rahardjo Pratijhno dan Bambang Udoyo selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) telah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 31 Juli 2019 dalam pengembangan kasus di Bakamla RI tersebut. Leni dan Juli disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun Bambang Udoyo dalam kasus ini ditangani oleh Polisi Militer TNI AL. Aduan pada saat menjabat selaku PPK yang bersangkutan adalah Anggota TNI AL. Sedangkan Rahardjo dalam upaya hukum banding pasca divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta selama 5 tahun penjara ditambah denda Rp600 juta subsidi 6 bulan kurungan. Keempatnya diduga menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain yang diduga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 63,8 miliar yang didasarkan atas hasil perhitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ● osm

Habib Luthfi Jadi Penasihat Menag

JAKARTA (IM) - Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menunjuk Habib Luthfi bin Yahya sebagai penasihat. Habib Luthfi akan bertugas memberikan saran-saran strategis selama Fachrul mengemban tugas di Kemenag.

"Menag menjadikan Habib Luthfi sebagai penasihatnya," kata Stafus Menag Kevin Haikal dalam keterangan tertulis, Minggu (20/12).

Namun Kevin mengungkapkan Habib Luthfi tidak masuk dalam struktural Kementerian Agama. Sebab, ia juga mengemban tugas sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.

"Jadi bukan mengangkat, sekali lagi, bukan mengangkat layaknya pejabat struktural, sehingga tidak berpotensi rangkap jabatan. Karena tentu kami paham posisi beliau sebagai

seorang anggota Wantimpres," jelasnya.

Fachrul memiliki alasan tersendiri memilih salah satu ulama karismatik NU ini menjadi penasihatnya. Selain memiliki kedekatan, nasihat Habib Luthfi dinilai berguna dalam meningkatkan kualitas serta kerukunan beragama. "Nasihat Habib Luthfi sangat dibutuhkan di tengah upaya Menag meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragama," ucapnya.

Sebagai informasi, Habib Luthfi adalah Rais 'Aam Idaroh Aliyah Jam'iyah Ahlith Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah (JATMAN) periode 2017-2022. Habib Luthfi saat ini juga dipercaya Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) masa jabatan 2019-2024. ● han



IDN/ANTARA

LATIHAN PEMBEBASAN SANDERA BRIGIF RAIDER 9

Prajurit Brigif Infanteri Raider 9/Dharaka Yudha melakukan misi pembebasan Bupati Banyuwangi yang disandera oleh teroris pada latihan pemantapan pasukan di Kantor Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (19/12). Latihan itu untuk melatih kesiapsiagaan prajurit pada misi pembebasan tawanan.

Satgas Terbitkan SE yang Wajibkan Rapid Test Antigen untuk Syarat Perjalanan

JAKARTA (IM) - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menerbitkan surat edaran (SE) yang mengatur protokol kesehatan selama libur Natal dan tahun baru bagi pelaku perjalanan di dalam maupun luar negeri. Salah satu aturan di dalamnya terkait kewajiban melakukan rapid test antigen.

SE tersebut bernomor 3 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Orang Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19. Surat ini berlaku sejak 19 Desember hingga 8 Januari 2021.

"Pengalaman tiga liburan sebelumnya, mobilitas warga selalu memicu peningkatan kasus penularan baru. Oleh karena itu, sudah seharusnya warga untuk lebih patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Semua diatur dalam surat edaran terbaru ini," kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan tertulis, Minggu (20/12).

SE tersebut berisi kewajiban menjalankan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan dengan tiga poin utama. Poin pertama kewajiban untuk mematuhi 3M atau memakai masker, menjaga jarak dan hindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun

atau menggunakan hand sanitizer.

Kedua, pengetatan protokol kesehatan sepanjang perjalanan yang perlu dilakukan berupa penggunaan masker wajib secara benar menutupi hidung dan mulut dengan jenis masker kain tiga lapis atau masker medis.

Pelaku perjalanan tidak diperkenankan makan dan minum di sepanjang perjalanan penerbangan bagi perjalanan yang kurang dari 2 jam, terkecuali bagi individu yang wajib mengonsumsi obat untuk keselamatan dan kesehatannya. Ketiga, pelaku perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam Pulau Jawa harus mengikuti sejumlah ketentuan. Salah satunya wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen atau pun PCR dengan jangka waktu tertentu bagi pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi udara, laut, maupun kereta api antarkota. Khusus untuk Bali, pelaku perjalanan menggunakan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan tes PCR. Sedangkan pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi darat atau laut, baik pribadi maupun umum, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen. ● dot

2 Polhukam

IDN/ANTARA



KBRI DAN ORMAS BERI PENGHARGAAN MENTERI AGAMA MALAYSIA

Koordinator Aliansi Organisasi Masyarakat Indonesia (AOMI) di Malaysia Hardjito Warno memberikan penghargaan kepada Menteri Agama Malaysia Datuk Dr Zulkifli Mohamad al-Bakri disaksikan Wakil Dubes Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Agung Cahaya Sumirat disela-sela Kongres AOMI, di World Trade Center Kuala Lumpur, Minggu (20/12). Penghargaan diberikan karena menteri agama memberikan bantuan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) terdampak Covid-19 di Malaysia.

Wapres Ma'ruf Harap Parpol Tak Dijadikan Tunggungan Pribadi

Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa peran parpol sangatlah strategis dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Ia berharap nantinya parpol bisa lebih proaktif dalam mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menutup gelaran acara Mukhtar

IX PPP secara virtual. Dalam kesempatan itu, Ma'ruf mengingatkan agar partai politik

tidak ditunggangi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. "Kita berharap agar partai politik tidak hanya dijadikan tunggungan atau kendaraan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi masing-masing guna memperoleh manfaat dan masalah yang sifatnya pribadi. Tetapi partai hendaknya digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat dan bangsa," kata Ma'ruf Amin dalam acara Penutupan Mukhtar IX Tahun 2020 melalui YouTube Petiga TV, Minggu (20/12).

Ma'ruf mengungkapkan

Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi Tegas Pegang Teguh Aturan

JAKARTA (IM) - Di media sosial (medsos), isu mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kembali mengemuka.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta DPR sebaiknya fokus untuk membuat undang-undang yang berkualitas, ketimbang membahas wacana masa jabatan presiden tiga periode.

"Baiknya DPR fokus hadirkan UU yang benar-benar berkualitas dan dihajatkan negara/rakyat. Soal masa jabatan Presiden tiga periode, sudah ditolak keras oleh Jokowi dan masa jabatan Presiden domain MPR," kata Hidayat melalui akun Twitternya, @hnuurwahid, Sabtu (19/12).

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani pada Novem-

ber tahun lalu mewacanakan masa jabatan presiden sebanyak tiga kali perlu dikaji dan dibicarakan di Komisi II DPR. Puan tidak memberikan sikap mengenai hal ini karena harus dikaji dengan melihat aspek perundang-undangan.

Menanggapi munculnya kembali isu masa jabatan presiden tiga periode, Juru Bicara Presiden Fadjoel Rachman menyampaikan sikap Jokowi.

Menurut dia, Jokowi memiliki sikap tegas lurus terhadap sumpah presiden untuk memegang UUD 1945 yang membatasi jabatan Presiden dua periode. "Presiden Jokowi tegak lurus terhadap sumpah presiden di depan MPR untuk memegang teguh UUD 1945 (pasal 9) yang membatasi memegang jabatan presiden

selama dua periode (Pasal 7)," kata Fadjoel melalui akun Instagramnya, @fadjoel, Minggu (20/12).

Wacana masa jabatan presiden tiga periode pernah berembus pada akhir tahun 2019 seiring dengan isu amendemen UUD 1946. Ketika itu, Presiden Jokowi sudah menegaskan sikapnya terkait isu amendemen UUD 1945. Salah satunya menolak wacana mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu satu, ingin menampar muka saya. Kedua ingin cari muka. Padahal saya sudah punya muka. Ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin 2 Desember 2019. ● han

Payung Hukum Vaksin Covid-19 Gratis Tunggu Hasil Uji BPOM

JAKARTA (IM) - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah baru akan mengeluarkan payung hukum terkait vaksin Covid-19 gratis setelah ada persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Persetujuan yang dimaksud terkait dengan bisa digunakan atau tidak vaksin Covid-19 tersebut berdasarkan uji klinis yang dilakukan. "Menunggu persetujuan BPOM ya," ujar Nadia, Minggu (20/12).

Nadia mengatakan, pi-

haknya masih menunggu hasil uji klinis yang tengah dilakukan BPOM terkait vaksin Covid-19 tersebut. Meskipun sebelumnya BPOM mengatakan bahwa hasil uji tersebut baru keluar pada akhir Januari 2021 mendatang.

Namun ia memastikan, pemberian vaksin Covid-19 yang akan diberikan kepada masyarakat, tergantung jumlah vaksin yang tersedia. Namun tenaga kesehatan adalah orang yang diutamakan untuk mendapatkan vaksin tersebut. "Yang pasti adalah tenaga kesehatan (yang mendapatkan vaksin Covid-19 utama)," ujarnya.

Nadia juga memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan akan mendapatkan vaksin Covid-19.

Mulai dari dokter, perawat, para penunjang, serta tenaga kesehatan lainnya.

Sebelumnya, Nadia mengatakan, jenis vaksin Covid-19 yang diberikan secara gratis untuk masyarakat. Seluruh vaksin Covid-19 yang disediakan oleh PT Bio Farma adalah gratis.

"Semua vaksin (Covid-19) yang nanti kita dapatkan dari hasil penyediaan Bio Farma diberikan secara gratis," ujar Nadia, Sabtu (19/12). ● pan



IDN/ANTARA

PELEPASLIARAN HARIMAU SUMATERA CORINA

Direktur Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Wiratno (kiri) didampingi Dirut RAPP Sihol Aritonang (tengah) saat melakukan pelepasliaran Harimau sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) yang diberi nama Corina, di kawasan hutan alam Semenanjung Kampar, Provinsi Riau, Minggu (20/12). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melepasliarkan Corina, setelah harimau korban jerat pemburu itu dinyatakan sembuh usai dirawat di Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Dharmasraya ARSARI selama delapan bulan.

Ini Tanggapan Pimpinan MPR soal Aksi saat Pandemi Covid-19

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, gerakan-gerakan ekstraparlementer untuk mewujudkan tujuan politik sekelompok orang, sesungguhnya adalah tindakan membuang energi secara percuma.

Menurut Lestari, para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, telah bersepakat memilih sistem demokrasi untuk menyalurkan aspirasi dalam proses bernegara.

"Sistem demokrasi yang kita sepakati bersama dirancang mampu mengakomodasi aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. Masyarakat bisa mengekspresikan aspirasi atau kepentingannya melalui mekanisme yang ada, termasuk pemilihan umum legislatif dan Presiden yang dilaksanakan secara langsung, jujur, dan transparan setiap lima tahun," kata Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/12) menanggapi aksi demo 1812.

Menurut Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sejak 2004, Indonesia telah memilih presiden, wakil di parlemen, dan para pemimpin daerah melalui mekanisme pemilihan langsung dalam sistem demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bersama.

Dengan demikian, ujarnya, masyarakat yang memiliki aspirasi dan kepentingan tertentu sebaiknya mengekspresikan

melalui mekanisme tersebut daripada melakukan gerakan ekstraparlementer.

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, adanya gerakan ekstraparlementer saat ini, bisa saja terjadi sebagai akibat dari pemikiran akan adanya kegagalan partai politik dalam mengartikulasikan aspirasi sekelompok masyarakat itu dalam sistem demokrasi.

Lebih jauh dia menyampaikan, sebaiknya kelompok masyarakat yang tidak puas dapat menempuh mekanisme secara konstitusional.

"Apabila tidak puas dengan partai politik yang ada, masyarakat dipersilakan mendirikan partai politik baru sebagai cara penyaluran aspirasi melalui mekanisme yang benar dan sesuai sistem yang berlaku, termasuk juga tentunya dalam menyampaikan ketidaksetujuan dalam menyikapi masalah," ujarnya.

Ia juga berpendapat, kerumunan massa yang terjadi ketika gerakan-gerakan ekstraparlementer digelar, dalam kondisi dan situasi pandemi seperti saat ini memiliki potensi penyebaran virus korona yang tidak boleh dipandang remeh. "Seharusnya semua pihak dapat bersikap secara arif dan bijaksana, apalagi angka penyebaran masih terus meningkat dan hendaknya kita harus memiliki kesadaran bahwa tindakan tersebut dapat membahayakan orang lain," ujarnya. ● mar

Menko PMK Gugah Kesadaran Bersama untuk Lawan Covid-19

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pandemi Covid-19 yang saat ini sedang terjadi merupakan momentum memperkuat kesetiakawanan dan solidaritas sosial.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSNS) Tahun 2020 di Manado, Sulawesi Utara, dikutip dari siaran pers, Minggu (20/12).

"Melalui momentum Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional Tahun 2020, saya mengharapkan kiranya dapat menggugah kesadaran kita bersama untuk menerapkan rasa kesetiakawanan sosial, peduli, berbagi dan gotong royong dalam menanggulangi dampak Covid-19," ujar Muhadjir.

Ia mengatakan, apabila nilai-

nilai kesetiakawanan sosial dapat diterapkan dengan baik, maka seluruh tantangan dan permasalahan bangsa bisa diatasi. Termasuk dalam hal penanganan pandemi Covid-19 yang masih menjadi musuh bersama bangsa ini.

"Penanganan dampak Covid-19 bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun menjadi tanggung jawab segenap elemen masyarakat Indonesia," kata dia.

Muhadjir berharap masyarakat bisa berlomba-lomba memberikan kontribusi agar bangsa Indonesia bisa mengatasi segala permasalahan yang ditimbulkan akibat Covid-19. "Mari kita lawan Covid-19 dengan menjadi pejuang kemanusiaan. Banyak yang dapat kita lakukan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan tentunya untuk bangsa dan negara," ujarnya. ● han